



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Berita korupsi yang elitis: studi wacana kritis atas berita korupsi untuk membongkar praktik pemberitaan yang elitis oleh media massa cetak

Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang
Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 11th, 2022
Revised Aug 31st, 2022
Accepted Oct 31th, 2022

Keyword:

Berita korupsi,
Media massa cetak,
Teks berita,
Konteks dan analisis wacana

ABSTRACT

Surat kabar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memproduksi dan mengontruksi sejumlah teks berita korupsi. Penelitian ini hendak mencermati dengan perspektif kritis wacana korupsi tersebut. Peneliti menggunakan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) yang ditawarkan oleh Teun A. van Dijk untuk menganalisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Data teks berita korupsi dihimpun peneliti dari ketiga media massa lokal tersebut, sedangkan data kognisi sosial diperoleh melalui wawancara dengan wartawan yang menulis berita korupsi serta data konteks sosial dihimpun dari sebuah LSM yang concern dengan masalah korupsi di NTT yakni PIAR-NTT serta melalui observasi lapangan. Peneliti menganalisis ketiga elemen wacana yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Temuan dari penelitian ini adalah berita korupsi dari surat kabar di NTT adalah adanya faktor yang turut mempengaruhi terbentuknya teks berita korupsi menjadi berita yang elitis seperti kepemilikan media, relasi kuasa dari aparat penegak hukum dan pejabat daerah. Media massa cetak dapat terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal, pasar atau negara. Konsep van Dijk tentang media yang tidak netral diafirmasikan kembali di dalam penelitian ini. Sikap kritis tentu sangat dibutuhkan oleh siapa saja yang membaca berita pada media massa.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang,
Universitas Nusa Nipa
Email: jonasgobang@gmail.com

Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi namun tampak sia-sia. Dalam lima tahun belakangan, buku-buku yang membahas tentang korupsi banyak diterbitkan, misalnya: karya oleh Bubandt (2014); Febari (2015); Latif (2019); dan Syahrani, Maharso & Sujawardi (2018). Di Indonesia, korupsi menjadi isu penting bahkan kini berada pada level darurat korupsi. Korupsi di Indonesia menjadi masalah besar dan termasuk bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang kian merebak dari pusat hingga ke semua wilayah di tanah air Indonesia (Indrayana, 2017).

Darurat korupsi di Indonesia diafirmasi oleh berbagai hasil riset yang menunjukkan bahwa terdapat fenomena yang disebut sebagai *kapitalisasi* terhadap sebuah perhelatan Pemilu (Dosi, 2012). Setiap terjadi pemilihan para pejabat publik, seperti bupati, gubernur bahkan parlemen selalu terjadi transaksi uang milyaran

rupiah. Konsekuensi negatif dari kapitalisasi ini adalah calon yang terpilih berhasrat mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat relasi antara perilaku korupsi para pejabat publik dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh para calon ketika mereka menjalani proses pemilihan (Ardianto, 2011). Lemahnya aturan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi dan bahkan mendorong seorang pejabat publik melakukan tindak korupsi. Faktor-faktor lain, seperti lemahnya fungsi rekrutmen partai politik dan perilaku tidak pernah puas dan terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi (Bergman, 2013).

Enoh Tanjong dalam penelitiannya di Kamerun tentang perlawanan media massa terhadap korupsi mampu membuktikan bahwa media massa mampu memainkan peranannya dalam mengontrol tata kelola pemerintahan bahkan mampu mengurangi tindak pidana korupsi di negara tersebut melalui pemberitaan tentang korupsi. Pertanyaannya, pemberitaan yang seperti apa yang dikembangkan oleh media massa cetak di Kamerun sehingga mampu mengurangi atau memberantas korupsi di negara tersebut? Bagaimana dengan pemberitaan korupsi di Indonesia? Lebih khusus lagi, bagaimana pemberitaan media massa cetak di Provinsi NTT tentang korupsi yang kian marak terjadi di salah satu provinsi termiskin di Indonesia ini?

Muhaimin berpendapat bahwa media massa menjual kepada khalayak sebagai satu-satunya pandangan yang layak untuk dianut. Media massa sesungguhnya perlu menanamkan kesadaran bagi warganya untuk bersikap antikorupsi, mengetahui sebab dan konsekuensi dari tindak korupsi, tetapi juga media massa menyajikan hasil investigasi dan menurunkan laporan tentang bahaya-bahaya akibat korupsi. Banyak politisi dan birokrat yang diberitakan media mengalami kehilangan pekerjaan akibat korupsi. Media massa di Kamerun melakukan rekonstruksi atas peristiwa korupsi menjadi berita yang dapat mempengaruhi opini publik (Eriyanto, 2001).

Korupsi bila dikaji secara teoritik (kriminologis) merupakan perwujudan dari kejahatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang sah dan melibatkan penyalahgunaan jabatan. Salah satu sanksi kemasyarakatan terhadap kejahatan korupsi adalah pemberian rasa malu (*shaming*) kepada si pelaku korupsi. Pemberian rasa malu (*shaming*) akan berjalan efektif apabila di seluruh lapisan masyarakat terdapat budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme (Marijan, 2019).

Pemberitaan tentang korupsi pada media massa cetak lokal NTT yang diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan memiliki relasi antara kognisi sosial wartawan dan produksi berita korupsi. Relasi atau hubungan antara kognisi sosial wartawan dan produksi teks berita korupsi dapat dilihat dari beberapa strategi yang menurut van Dijk merupakan kunci untuk memahami produksi berita. Berita korupsi di Provinsi NTT cenderung bersifat elitis karena wartawan selalu mengutip pendapat para pejabat atau kelompok elit di daerah. Wartawan mengabaikan pendapat atau komentar dari warga atau rakyat NTT yang merasakan secara langsung dampak buruk dari tindak pidana korupsi di Provinsi NTT.

Kualitas berita dihasilkan oleh media massa mengingatkan kita pada tujuan utama dari jurnalisme, yakni menyediakan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Morar mengatakan, "*Menschen tun illegas und ich schreibe darüber. Das ist nun mal die Aufgabe eines Journalistin*" (Orang-orang membuat sesuatu secara ilegal dan saya menulis tentang hal itu secara jujur. Itulah tugas seorang wartawan). Kendati jurnalisme itu selalu berubah sesuai zaman atau dengan kata lain setiap generasi menciptakan jurnalismenya sendiri, tetapi tujuannya tetap sama (Bergman, 2013).

Hadad menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh media massa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, karena basis media massa adalah kepercayaan (*trust*) publik. Demikian juga dipertegas Sulhan tentang media massa yang harus mempertahankan kepercayaan masyarakat atau pembacanya. Ignas Kleden berpendapat bahwa secara umum wartawan media massa selalu berurusan dengan berita, yaitu informasi tentang apa saja yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu, ada tidaknya *trust* itu juga berkaitan dengan tindakan para pemimpin politik. Manakala pemimpin itu terlibat di dalam skandal dan media menyiarkan secara luas skandal itu, *trust* terhadap pemerintah akan mengalami penurunan.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian terhadap pemberitaan media massa cetak di Provinsi NTT tentang korupsi adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pengamatan dan analisis terhadap teks berita korupsi yang dilansir oleh berbagai surat kabar lokal di Provinsi NTT. Peneliti menggunakan metode analisis wacana dari Teun van Dijk yang mengedepankan tiga aspek yakni analisis teks, konteks sosial dan kognisi sosial.

Penelitian ini bertolak dari paradigma teori kritis. Perspektif teori kritis menegaskan bahwa media massa berfungsi memberikan pembenaran (justifikasi) dan mendukung *status quo* dengan mengorbankan masyarakat. Para pendukung teori kritis percaya bahwa masyarakat ditindas oleh penguasa, para pemilik modal dan pada gilirannya media massa dipakai sebagai alat untuk menindas masyarakat.

Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah teks berita korupsi dan proses produksi berita-berita korupsi. Sedangkan unit observasi yang menjadi subyek penelitian dilakukan oleh peneliti adalah para wartawan. Redaktur, pemilik media dan institusi media massa cetak yang terdapat di Provinsi NTT.

Media massa cetak di Provinsi NTT yang menjadi objek penelitian adalah surat kabar harian *Pos Kupang*, *Flores Pos*, dan *Timor Express*. Ketiga surat kabar harian ini dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena ketiganya merupakan surat kabar harian yang beredar luas di wilayah Provinsi NTT. Oplag *Pos Kupang* setiap harinya 30.000 exemplar, *Flores Pos* setiap harinya ber-oplag 15.000 exemplar sedangkan *Timor Express* setiap harinya mencetak 20.000 exemplar. Oplag dari setiap media massa lokal ini sewaktu-waktu dapat meningkat berdasarkan isu yang dianggap sexy. Ketiga media massa cetak lokal tersebut termasuk dalam kategori surat kabar daerah di Indonesia yang terdapat di Provinsi NTT.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini selalu memperhatikan konteks historis dengan menentukan berita-berita tentang korupsi pada media massa cetak di Provinsi NTT dari kasus-kasus korupsi yang paling fenomenal yang terjadi di Provinsi NTT. Penentuan ini berdasar pada criteria epistemologis dari paradigma kritis yang menekankan konsep subyektivitas di mana nilai-nilai yang dianut oleh peneliti secara subyektif turut serta menentukan kebenaran tentang sesuatu hal.

Erianto menegaskan bahwa dalam penelitian isi media dalam perspektif positivistik, perlu mengembangkan studi analisis isi yang kuantitatif, dengan sampel yang ketat dan perhitungan statistik yang matematis. Namun penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui metode pengumpulan data kualitatif. Penelitian kualitatif membutuhkan wawancara mendalam dengan wartawan dari media massa yang menjadi obyek kajian. Peneliti juga mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dengan para wartawan, redaktur berita kriminal (korupsi) dan pemilik media yang selanjutnya dibutuhkan dalam proses analisis kognisi sosial seperti yang dianjurkan oleh Teun van Dijk dalam metode analisis wacana.

Van Dijk dalam Crowley & Mitchell (1994) memperkenalkan model kognisi sosial yang menghubungkan antara teks dengan masyarakat. Di sini digambarkan perlu ada penelitian mengenai representasi mental dari komunikator/wartawan. Ini dianggap sebagai variabel penengah karena komunikator/wartawan sebagai bagian dari masyarakat yang akan selalu *socially shared* dengan wacana dominan yang berkembang dalam masyarakat. Secara ringkas teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : pengumpulan teks berita korupsi, wawancara, studi pustaka dan observasi.

Validitas Penelitian

Dalam menjaga validitas data di dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui triangulasi data atau upaya membandingkan data (*cross check*) yang diperoleh melalui wawancara dan data hasil observasi serta data-data yang diperoleh melalui studi pustaka dan pengumpulan dokumen. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik kecukupan referensial dengan mengumpulkan sejumlah referensi dari berbagai sumber. Kejegan pengamatan juga dilakukan oleh peneliti untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang berkaitan dengan proses pemberitaan tentang korupsi oleh media massa cetak di Provinsi NTT.

Hasil dan Pembahasan

Pertarungan antara Kepentingan Elit dan Rakyat

Wang (2013) berpendapat bahwa dari perspektif kritis, praktik wacana media massa bukanlah suatu yang netral. Di balik berita-berita itu ada kekuasaan modal, politik dan ideologi, yang memengaruhi, mengarahkan, mencoba membentuk realitas pikiran pembaca. Demikian juga Bergman mengatakan bahwa hiper-komersialisme pada gilirannya akan mereduksi produksi media massa menjadi bahan komoditi yang sering mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan jurnalisme yang mengabdikan kepada keadilan dan kebenaran.

Menurut Dalisay & Yamamoto (2012) terdapat relasi antara media massa lokal dengan para pembacanya yang adalah masyarakat setempat (anggota komunitas). Relasi ini memberi penguatan pada peran media massa sebagai agen yang melakukan kontrol sosial. Price (2012) mempertegas bahwa memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi tentang proses hukum dan kepastian hukum. Media jangan sampai membuat manipulasi oleh kepentingan siapa pun yang dapat mencederai rasa keadilan. Pemberitaan tentang korupsi oleh media massa cetak di Provinsi NTT tidak terpisahkan dengan konteks sosial di mana teks tersebut

diproduksi dan dikonstruksi. Hal ini karena teks berita korupsi tidak diproduksi dan dikonstruksi pada ruang hampa. Teks berita korupsi diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan dan pekerja media lainnya dalam konteks masyarakat NTT.

Media massa cetak di Provinsi NTT yang dalam memproduksi dan mengontruksi berita-berita korupsi memiliki relasi dengan situasi dan kondisi masyarakat NTT. Situasi dan kondisi masyarakat NTT pada saat wartawan memproduksi dan mengontruksi berita-berita korupsi menunjukkan bahwa masyarakat NTT berada pada tingkat kesejahteraan dan pelayanan publik yang rendah. Kondisi ini tentu saja diperparah dengan tingkat korupsi yang tinggi di Provinsi NTT.

Paul SinlaEloE (2010), pegiat LSM PIAR-NTT menegaskan bahwa kasus-kasus korupsi di NTT terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat NTT karena anggaran pembangunan di daerah NTT sebagian besar dikorupsi oleh para pejabat daerah. Data PIAR-NTT yang diberikan oleh Paul SinlaEloE (2010) menunjukkan bahwa terdapat 98 (73%) kasus korupsi yang dipantau oleh PIAR NTT terjadi pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga NTT. Data BPS NTT juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan NTT 27,51%, lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional yaitu 15,52%. Kantong-kantong kemiskinan banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan yang menunjukkan pemerataan pertumbuhan ekonomi belum berjalan sesuai harapan.

Potret memprihatinkan juga terlihat dari rendahnya derajat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT, hanya 65,40% lebih rendah dari rata-rata nasional 70,59%. Hal ini juga bisa terlihat dari tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA tahun 2010, terendah se-Indonesia. Siswa NTT yang tidak lulus jumlahnya lebih dari separuh, mencapai 52,08%. Pembangunan sektor kesehatan juga tergolong rendah. Potensi kematian bayi sebesar 31 orang/1000 kelahiran dan angka harapan hidup rata-rata penduduk juga jauh lebih rendah dari rata-rata nasional.

Hal tersebut di atas diperparah dengan kondisi masyarakat di Provinsi NTT yang semakin memprihatinkan tatkala datangnya musim kemarau panjang. Gagal panen, telah menyebabkan ratusan ribu keluarga petani sangat menderita, khususnya anak-anak balita. Pemberitaan tentang kelaparan di wilayah Provinsi NTT, atau bertambahnya balita busung lapar bahkan sampai meninggal dunia bukan hanya kali ini saja terjadi. Bertahun-tahun, kejadian tersebut terus berulang. Seharusnya penanganan yang dilakukan tidak bisa parsial atau terpisah-pisah. Kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, pertumbuhan ekonomi rendah dan korupsi, saling berkaitan dan makin menyengsarakan masyarakat.

Pemberitaan yang Elitis tentang Korupsi

Dalam konteks masyarakat NTT yang masih dikategorikan sebagai masyarakat miskin, tujuan pemberitaan tentang korupsi oleh media massa cetak lokal adalah : Agar dana atau kebijakan pembangunan dapat menyentuh atau dirasakan oleh masyarakat luas, bukan oleh segelintir orang; Agar dana/bantuan tepat sasaran, tepat manfaat, tepat guna, tepat waktu, tepat tanggung jawab publiknya, dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan beberapa indikator kemajuan ekonomi, adanya partisipasi masyarakat, transparansi, dan hasil bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik; Mengontrol kinerja aparat pemerintah pengelola dana; Mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab di balik setiap kebijakan penganggaran, dan pemanfaatannya harus dilakukan secara transparan; Agar Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan lainnya dari pemerintah Pusat melalui APBN, APBD I dan APBD II bisa diketahui publik; dan Memberi ruang bagi warga sendiri dalam mengawasi dan mengontrol pemanfaatan dana melalui pemberitaan di media.

Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media massa cetak di Provinsi NTT belum memenuhi atau mencapai target tujuan pemberitaan tentang korupsi tersebut di atas. Bahkan pemberitaan tentang korupsi bersifat elitis karena didominasi oleh kelompok-kelompok elit di daerah yang memiliki kekuasaan dan akses yang relatif tinggi terhadap media seperti kelompok elit penegak hukum, elit dalam kelompok masyarakat seperti ketua LSM/NGO, anggota DPRD, calon anggota DPRD, dosen, mantan wartawan, dan para advokat/pengacara.

Ironisnya para pelaku kejahatan korupsi adalah juga kelompok elit yang memiliki kuasa dan akses terhadap media massa lokal di NTT. Mereka adalah anggota DPRD, kepala dinas instansi tertentu, bendahara dinas tertentu, pihak ketiga/rekanan/kontraktor, pengurus dana bergulir PNPM, dll. Rakyat NTT umumnya tidak mengetahui berapa besar dana pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang dikorupsi oleh para koruptor di NTT. Media massa cetak di Provinsi NTT pun tidak secara gamblang memberitakannya.

Media massa cetak di Provinsi NTT masih menganggap kasus-kasus korupsi sebagai musuh pembangunan dan momok kemanusiaan yang paling besar dan jahat, dan oleh karena itu harus dilawan dan

diberantas. Media massa cetak di Provinsi NTT tidak memiliki strategi khusus untuk melawan korupsi yang kian marak di Provinsi NTT dengan pemberitaan yang seimbang atau yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Simarmata menjelaskan bahwa media massa menggunakan bahasa secara efektif dalam hubungan sosial dan membentuk realitas sosial. Berita yang dimanifestasikan dalam bentuk bahasa harus dapat dimengerti bersama anggota masyarakat. Dengan bahasa, realitas yang terkonstruksi tadi dapat disebarluaskan melalui proses representasi simbolik. Maryani menjelaskan bahwa realitas itu adalah hasil konstruksi yang diciptakan secara subjektif (*transactional, subjectivist and created findings*).

McQuail (2010) membedah prinsip akuntabilitas media dalam hubungan dengan kewajiban media dalam memberikan jawaban kepada siapapun tentang segala yang diberitakan sesuai dengan kriteria atau aturan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari media massa. Abror menegaskan pula bahwa media massasungguhnya adalah cermin (*mirror*) dari peristiwa-peristiwa di masyarakat atau dunia, menyajikan refleksi yang bisa dipercaya. Demikian juga Hill berpendapat bahwa media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyebaran dan akselerasi informasi. Selain itu, Mcpherson juga menegaskan adanya peran media massa dalam membangun demokrasi.

Dosi mengatakan bahwa terdapat ideologi yang berada di balik produksi sebuah berita oleh media massa. Karena itu perlu ditemukan relasi-relasi kekuasaan dalam sebuah berita. Dalam konteks historis, media massa cetak di Provinsi NTT merepresentasikan seluruh kekuasaan yang ada di dalam dan di luar lingkungan media. Tantangan yang dihadapi oleh media massa cetak di Provinsi NTT adalah: 1) Minat baca yang rendah. Mayoritas masyarakat NTT, khususnya di Kepulauan Flores dan Lembata tidak atau belum memiliki budaya membaca; 2) Hal itu didukung lagi oleh kemiskinan yang berdampak nyata pada rendahnya daya beli masyarakat, khusus kemampuan membeli koran.

Simpulan

Pemberitaan media massa cetak lokal NTT tentang berbagai kasus korupsi di Provinsi NTT menjadi fokus perhatian peneliti. Dengan perspektif kritis, peneliti mencurigai bahwa berita-berita korupsi pada media massa cetak di Provinsi NTT diproduksi baik oleh wartawan maupun oleh institusi media dengan pertimbangan ekonomi politik tertentu yang berorientasi pada kekuasaan para elit pemerintah daerah dan mengejar profit atau terjebak dalam determinasi pasar. Media massa cetak di Provinsi NTT nampaknya mengambil posisi yang aman dalam konstelasi kepentingan ekonomi (kepemilikan), kekuasaan (politik) dan ideologi yang hendak diperjuangkannya. Dalam tegangan ini, media massa cetak di Provinsi NTT memproduksi berita-berita tentang korupsi di Provinsi NTT. Di satu pihak media massa cetak di Provinsi NTT harus menjalankan fungsinya secara independen, tetapi di lain pihak media massa cetak di Provinsi NTT dapat terjebak di dalam mekanisme pasar dan masuk dalam pusaran kekuatan politik atau kekuasaan dari elit pemerintah daerah.

References

- Ardianto, Elvinaro. (2011). *Metodologi penelitian untuk public relations kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Simbiosis rekayasa media.
- Bergman, Tabe. (2013). Relevant but long since absent: Re-establishing a political economy of the Dutch media. *International Journal of Communication*, 7, 19.
- Bubandt, Nils. (2014). *Demokrasi, Korupsi, dan Makhlik Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Crowley, David J., & Mitchell, David. (1994). *Communication theory today*. Stanford University Press.
- Dalisay, Francis, & Yamamoto, Masahiro. (2012). Local newspaper coverage and endorsement of a US military buildup in the Pacific. *International Journal of Communication*, 6, 21.
- Dosi, Eduardus. (2012). *Media massa dalam jaring kekuasaan: sebuah studi tentang relasi kekuasaan di balik wacana*. Ledalero.
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta.
- Febari, Rizki. (2015). *Politik pemberantasan korupsi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadad, Toriq. 2009. "Hegemoni Media Massa : Bala atau Berkah?" (*ms.*) dalam Seminar Nasional bertajuk "Media Massa di Era Cyberspace", Yogyakarta.
- Handayani, Dwi Maria. (2019). Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno Dan Perjanjian Lama. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1–8.
- Indrayana, Denny. (2017). *Jangan bunuh KPK*. Adamssein Media.
- Marijan, Kacung. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana.

-
- Maryani, Eni. 2012. Seminar Metode Penelitian Kualitatif : “Perspektif Ilmu Komunikasi”. Program Doktor Ilmu Komunikasi, Fikom, Universitas Padjajaran Bandung, Tahun Akademik 2012/2013.
- McQuail, Denis. (2010). *McQuail's mass communication theory*. Sage publications.
- Price, Monroe, & Strelau, Nicole. (2012). Media and transitional justice: Toward a systematic approach. *International Journal of Communication*, 6, 23.
- Saptono, Irawan. 2001. “Surat Kabar di Tengah Kecamuk”. Jakarta: Majalah *PANTAU*, Edisi Juli.
- Simarmata, Salvatore. 2010. “Menyingkap Representasi Ideologis Teks Media dengan Pendekatan Semiotik : Sebuah Agenda Penelitian”, dalam Hermin Indah Wahyuni (ed.), *Komunikasi dan Dunia Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Fisipol UGM, 2010, hlm. 86 – 87.
- SinlaEloE, Paul. (2010). Korupsi dan Pemberantasannya di Propinsi Miskin. *Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Pemuda Antikorupsi Di, Jakarta*.
- Syahroni, Maharso, & Sujarwadi, Tomy. (2018). *Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit*. Deepublish.
- Wang, Haiyan, Lee, Francis L. F., & Wang, Bess Y. (2013). Foreign news as marketable power display: Reporting foreign disasters by the Chinese local media. *International Journal of Communication*, 7, 19.